

## Kekuatan Opini Publik

oleh==>Wahyudi Kumorotomo

Kedaulatan Rakyat, 14/12/2009 08:11:04

HARI -hari ini, kita menyaksikan pengaruh kekuatan opini publik yang begitu dahsyat terhadap arah kebijakan yang diambil oleh para pejabat puncak. Ketika pejabat Polri mengungkapkan tuduhan penyalahgunaan kewenangan oleh dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dan presiden mengeluarkan Perpu yang menon-aktifkan keduanya, reaksi publik begitu keras menolak kebijakan ini. Publik justru telah mencium aroma kesewenang-wenangan dan ketidakadilan dalam langkah presiden, Polri dan Kejaksaan Agung tersebut.

Dukungan publik kepada Bibit dan Chandra meluas dalam berbagai bentuk di seluruh tanah-air. Di dunia maya, dukungan masyarakat melalui jaringan sosial facebook bergelora, dari jumlah ribuan hingga jutaan orang. Sementara itu, di hampir semua media para pengamat dan penulis mengungkapkan opini yang menentang kebijakan kriminalisasi KPK. Betapapun, publik telah melihat bahwa KPK adalah sebuah lembaga anti-korupsi yang menumbuhkan harapan baru bagi pemerintahan yang lebih bersih di Indonesia.

Opini publik yang terbentuk di dunia maya dan media selanjutnya juga menggerakkan aksi-aksi jalanan. Di hampir semua kota besar berlangsung demonstrasi yang menuntut pembebasan Bibit-Chandra. Aksi itu pada mulanya bersifat sporadis. Tetapi ternyata seiring dengan wacana tentang konflik terselubung antara Polri-Kejaksaan dan KPK, gelombang aksi terus datang beruntun. Demonstrasi tandingan oleh pelaku-pelaku bayaran yang mendukung Polri dan pengadilan atas Bibit-Chandra tidak mampu membendung demonstrasi massal yang didukung opini publik. Persaingan terselubung antara KPK dan Polri yang mengental dalam wacana 'cicak vs buaya' menggelinding ke ranah publik dengan mayoritas masyarakat berada di belakang komunitas 'cicak'. Dalam beberapa demonstrasi di depan gedung KPK yang saya saksikan, istilah 'cicak' bahkan sudah berubah menjadi akronim 'Cinta Indonesia Cinta KPK'. Tampaknya, reaksi itu di luar perhitungan presiden SBY sendiri. Itulah sebabnya, untuk meredam suara publik presiden membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang terdiri dari delapan orang pakar politik dan hukum. Namun demikian, opini publik saat ini tampaknya sudah bergerak lebih jauh. Bukan hanya ke kasus Bibit-Chandra, tetapi mengarah kepada upaya penuntasan kasus bail-out Bank Century yang nyata-nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun. Sembilan orang anggota DPR yang menginisiasi hak angket terkait kasus Bank Century pada mulanya terlihat gamang dan kurang percaya diri. Lagi-lagi, opini publik yang berpihak kepada mereka kemudian mendorong gagasan hak angket menggelinding deras.

Selain opini yang berkembang di media elektronik dan cetak, unjuk-rasa berbagai kota juga menghendaki diteruskannya hak angket DPR hingga tuntas. Ribuan pengunjuk-rasa juga hadir di depan gedung DPR/MPR ketika para politisi sedang mengadakan rapat paripurna Pansus Bank Century. Pernyataan presiden yang mendukung pengungkapan kasus Century supaya terang-benderang juga memberi angin kepada para politisi di DPR. Oleh karena itu, dari usulan awal angket bank Century yang hanya ditandatangani oleh 139 orang, kini sebanyak 503 dari total 560 anggota DPR telah memberikan dukungannya. Kalau sebelumnya tidak ada satupun anggota DPR dari Partai Demokrat yang tanda-tangan, belakangan terdapat 148 orang dari Partai Demokrat yang ikut membubuhkan tanda-tangannya.

Betapapun, kini para tokoh elite politik harus benar-benar menakar dengan baik kekuatan opini publik. Tokoh politik dan pemerintah tidak mungkin menyumbat arus informasi kepada publik. Sebelum para aktivis komunitas Bendera (Benteng Demokrasi Rakyat) membeberkan aliran dana Bank Century kepada banyak tokoh politik di lembaga negara dan kabinet, SMS mengenai aliran dana yang informasinya konon dari PPATK itu sudah berseliweran kepada banyak pihak. Demikian pula, walaupun media massa dapat dipengaruhi oleh para pejabat untuk menseleksi berbagai berita tentang kasus ini, begitu banyak saluran di dunia maya yang dapat diakses oleh masyarakat. Semakin kasus ini ditutup-tutupi, justru akan semakin besar kecurigaan publik kepada para tokoh politik dan pejabat pemerintah.

Pelajaran yang harus dipetik oleh para elit politik dan pejabat pemerintah dari kasus Bibit-Chandra dan kasus Bank Century ialah bahwa dalam iklim demokrasi mereka tidak mungkin bisa membendung arus opini publik. Betapapun, rakyat Indonesia sudah semakin pintar dalam menilai semua hal dibalik rumusan kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan publik hendaknya memang dirumuskan dengan mengikuti kehendak rakyat, public policy is public consent. Kebenaran bisa saja ditelikung oleh para elite politik dengan memanfaatkan aturan-aturan hukum atau jargon-jargon moralitas yang disampaikan melalui pernyataan politik. Tetapi opini publik dan landasan moral yang sejati tetap tidak akan bisa dilawan. Pada akhirnya kebenaran yang sejati akan terungkap, dan sejarah selalu bisa membuktikannya. (Penulis adalah dosen Fisipol dan MAP-UGM)-n

\*\*\*\*\*